



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**INSPEKTORAT
II**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSPEKTORAT II**

TAHUN 2020

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

JAKARTA, JANUARI 2021

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Tahun 2020 merupakan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas terhadap kinerja sekaligus bahan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan LAKIP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat selain sebagai pertanggungjawaban atas Pelaksanaan tugas Inspektorat II selama tahun 2020, juga sebagai informasi dalam meneruskan dan meningkatkan pengawasan unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini saya selaku Inspektur II mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana yang telah mendukung sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat II pada tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 26 Januari 2021

INSPEKTUR II



Wawas Swathatafrijiah

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT II

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri, serta penyusunan laporan pengawasan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE), Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) dan Unit Vertikal Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Sidoarjo.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan rencana dan program pengawasan internal;
- Pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- Pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Peran Strategik Inspektorat II sebagaimana yang tercantum dalam peran strategik Inspektorat Jenderal yaitu :

1. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi

terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN.

2. Paradigma baru pengawasan memfokuskan pada pembimbingan- pendampingan dan pengawasan sebagai mitra manajemen dengan melakukan bimbingan maupun konsultasi untuk membantu pencapaian tujuan organisasi selain tugas-tugas pemeriksaan.
3. Pelimpahan hampir seluruh tugas sektor Industri kepada pemerintah daerah, merupakan cermin dari konsistensi Kementerian Perindustrian dalam mengaktualisasikan Peraturan / Perundang-Undangan. Namun demikian, dari sisi pengawasan masih terdapat perbedaan pemahaman yang berimplikasi terhadap pengawasan yang dilakukan pemerintah. Karena itu ada dua peraturan yang digunakan yaitu PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka pengaturan pengawasan yang menjadi kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi lebih jelas.
4. Dalam menyikapi perkembangan paradigma pengawasan sebagaimana dimaksud di atas, maka Inspektorat II memiliki peran strategik dalam rangka mendayagunakan pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II terdiri dari :

1. Subbagian Program dan Tata Usaha
 - Subbagian Program dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha, dan rumah tangga inspektorat.

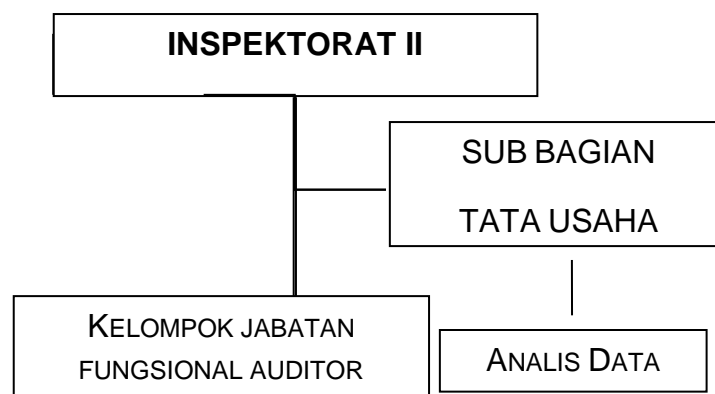
- Subbagian Program dan Tata Usaha secara struktural bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2020 ini, Inspektorat II memiliki total pegawai sebanyak 15 orang dengan rincian 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Subbagian Program dan Tata Usaha, dan 13 (Tiga belas) orang Auditor.

Struktur organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut:



D. CAKUPAN TUGAS

Sesuai dengan Penetapan Cakupan Tugas Objek Pengawasan Unit Vertikal di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat II memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit dan reviu, serta penyusunan laporan hasil pengawasan di satuan kerja/unit:

1. Unit Pusat, yaitu:
 - a) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ditjen ILMATE)
 - b) Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA)
2. Unit Vertikal Balai, yaitu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo; dan
3. Dinas/Satker yang menangani Perindustrian di Provinsi (Dekonsentrasi) 34 Provinsi seluruh Indonesia, Yaitu:
 - a) Dinas Perindag Prov. Nangroe Aceh Darussalam;
 - b) Dinas Perindag Prov. Sumatera Barat;
 - c) Dinas Perindag Prov. Bengkulu;
 - d) Dinas Perindag Prov. Sumatera Utara;
 - e) Dinas Perindag Prov. Riau;
 - f) Dinas Perindag Prov. Kepulauan Riau (Kepri);
 - g) Dinas Perindag Prov. Jambi;
 - h) Dinas Perindag Prov. Sumatera Selatan
 - i) Dinas Perindag Prov. Bangka Belitung;
 - j) Dinas Perindag Prov. Lampung;
 - k) Dinas Perindag Prov. DKI Jakarta;
 - l) Dinas Perindag Prov. Banten;
 - m) Dinas Perindag Prov. Jawa Barat;

- n) Dinas Perindag Prov. Jawa Tengah;
- o) Dinas Perindag Prov. DI. Yogyakarta;
- p) Dinas Perindag Prov. Jawa Timur;
- q) Dinas Perindag Prov. Bali;
- r) Dinas Perindag Prov. Nusa Tenggara Barat;
- s) Dinas Perindag Prov. Nusa Tenggara Timur;
- t) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Utara;
- u) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Barat;
- v) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Tengah;
- w) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Selatan;
- x) Dinas Perindag Prov. Kalimantan Timur;
- y) Dinas Perindag Prov. Gorontalo;
- z) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Utara;
- aa) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Barat;
- bb) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Tengah;
- cc) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Tenggara;
- dd) Dinas Perindag Prov. Sulawesi Selatan;
- ee) Dinas Perindag Prov. Maluku Utara;
- ff) Dinas Perindag Prov. Maluku;
- gg) Dinas Perindag Prov. Papua;
- hh) Dinas Perindag Prov. Papua Barat.

E. LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM

Dalam rangka pencapaian tujuan dan fungsi tersebut, Inspektorat II telah menyusun kegiatan tahun 2020 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan program pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2020, Inspektorat II melakukan kegiatan guna pencapaian target dari sasaran strategis tahun 2020 dan menunjang program Inspektorat Jenderal, melalui Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II.

Pelaksanaan kegiatan/program dilatarbelakangi oleh kebijakan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal dalam tahun 2020 yakni :

- Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, dimana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi pemeriksaan, tetapi juga sebagai *Counseling Partner* (Mitra Kerja).
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan;
- Menyempurnakan sistem dan prosedur dalam pengawasan sebagai upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

Sesuai dengan hal tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Unit Pusat dan Vertikal, Pengawasan Dekonsentrasi Perindustrian, dan Pengawasan Untuk Tujuan Tertentu/Riksus** sesuai dengan cakupan tugas berdasarkan Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 sebagaimana telah disampaikan di atas.

Selain melakukan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja, untuk menjaga kualitas laporan keuangan yang handal, transparan dan akuntabel, Inspektorat II juga melaksanakan kegiatan **Reviu Laporan Keuangan/BMN** di unit satker pusat dan vertikal yang menjadi cakupan tugasnya. Serta sebagai pengawas intern Kementerian/Lembaga, APIP juga memiliki tugas untuk memberikan keyakinan

terbatas (*limited assurance*) terhadap perencanaan penganggaran sesuai dengan PMK Nomor 78 Tahun 2019. Oleh karena itu, pada tahun 2020 Inspektorat II juga mendapatkan amanah untuk melaksanakan kegiatan **Reviu Perencanaan dan Program** terhadap seluruh unit kerja di bawah cakupan tugas Inspektorat II agar penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran dilakukan sesuai kaidah peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan Industri Nasional, Inspektorat II melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan yang terbagi menjadi **Monev Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk satuan kerja Eselon I** dan **Monev Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan sesuai Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Monev Program Penumbuhan Wirausaha Baru Ditjen IKMA)**. Dalam mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut, Inspektorat II melaksanakan kegiatan Layanan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan, serta Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Perencanaan strategis merupakan langkah awal dalam melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, perencanaan strategis yang disusun haruslah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan memperhatikan tugas dan fungsi.

Inspektorat II sebagai bagian dari unit kerja Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai Unit Pengawas Intern Kementerian Perindustrian adalah “Menjadi pemberi jasa konsultasi / mitra kerja dan penjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri”.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. Mengembangkan sistem pengawasan intern yang efisien dan efektif sebagai katalisator dan akselerator pembangunan industri;
- c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

3. Tujuan Pengawasan

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal dalam 5 (lima) tahun ke depan Inpektorat Jenderal mempunyai tujuan **“Melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Perindustrian”** sebagai unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi utama pengawasan.

4. Strategi pengawasan

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut maka strategi pengawasan yang digunakan adalah :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional;
- c. Mempercepat tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan;
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh unsur pengawasan;
- e. Meningkatkan profesionalitas dan kemandirian aparatur pengawasan;
- f. Meningkatkan budaya pengawasan.
- g. Melakukan pengawasan sesuai Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2008.

Untuk itu telah ditetapkan sasaran pengawasan yaitu meningkatnya kinerja semua unsur Kementerian dengan terlaksananya program pembangunan serta mencegah dan menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang, kebocoran serta pemborosan keuangan negara.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran pengawasan intern Kementerian Perindustrian, telah disusun kebijakan pengawasan Kementerian Perindustrian dimana Inspektorat II merupakan bagian pelaksana kebijakan sebagai berikut:

1. Paradigma Pengawasan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pengawasan, dilaksanakan Paradigma baru pengawasan, dimana secara bertahap kegiatan pengawasan akan didorong dari Post Audit (*watch dog*) menjadi pembinaan (*counseling partner*) dan ke depan menjadi Penjamin Mutu (*quality assurance*). Dengan paradigma baru tersebut ukuran keberhasilan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) bukan dari jumlah temuan, tetapi dari ukuran sejauh mana dapat membantu manajemen unit kerja mengatasi permasalahan yang timbul. Permasalahan tersebut meliputi aspek pengelolaan resiko, control, dan tata kelola yang baik yang pada akhirnya dapat membantu menangani resiko.

2. Nilai-nilai Pengawasan

Prinsip dan nilai-nilai penting yang diterapkan dalam pelaksanaan pengawasan adalah pengawasan yang transparan, obyektif, independen dan akuntabel. Nilai/prinsip tersebut menjiwai pelaksanaan pengawasan dan menjadi pedoman bagi pengaturan kode etik dan perilaku pengawas intern.

3. Peran Pengawasan

Fungsi dan Peran Pengawasan diarahkan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan demi tercapainya sasaran/tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

4. Lingkup Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan menempatkan aparat pengawas sebagai mitra kerja auditi sehingga lingkup pengawasan dimulai dari tahap Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan kegiatan, sampai dengan Hasil yang diperoleh (*input, process, output, outcome, impact*), untuk memastikan bahwa :

- a. Petunjuk dan standar yang jelas dan faktor input yang ditetapkan telah tersedia;
- b. Segala proses dan perangkat penunjang berjalan sebagaimana mestinya;
- c. Output yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

5. Kebijakan Pengawasan

- a. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin mutu kegiatan pemerintahan di bidang industri yang dilaksanakan oleh auditi.
- b. Menerapkan audit berbasis resiko.

6. Obyek Pengawasan

Objek pengawasan Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian adalah Unit Kerja Kementerian Perindustrian baik di Pusat maupun di daerah, serta Provinsi penerima Dana Dekonsentrasi. Saat ini obyek pengawasan sebanyak 37 Unit kerja, terdiri dari: Unit Pusat 2 Unit, Unit Kerja Vertikal di daerah 1 Unit, Dinas Provinsi Penerima dana Dekonsentrasi sebanyak 34 Unit.

7. Fokus Pengawasan

Pengawasan intern yang dilakukan Inspektorat II Inspektorat Jenderal, berfokus pada 3 (tiga) aspek pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

- a. Pengawasan Program/Kegiatan, dengan melakukan audit kesesuaian pelaksanaan program dengan RPJM, Renstra, Tupoksi, Kebijakan dan Peraturan Perundangan yang berlaku dan sumber daya manusia serta sistem/prosedur kerja (SOP)
- b. Pengawasan Anggaran/Keuangan dan Barang Milik Negara, dengan mengaudit kesesuaian ketertiban pelaksanaan anggaran/keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, analisis kebutuhan BMN, Pencatatan dan Inventarisasi BMN, Sistem pengamanan terhadap penyimpanan BMN, Prosedur Penghapusan BMN.
- c. Pengawasan Pelayanan Publik, dengan Monitoring dan audit penerapan *e-licensing*, Evaluasi penerapan sistem integritas pelayanan publik dan Monitoring penerapan praktek anti korupsi.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada Tahun 2020 Inspektorat II memiliki program dan kegiatan melaksanakan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara Kementerian Perindustrian** sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024, dan rencana kinerja Inspektorat Jenderal. Sasaran strategis Inspektorat II adalah sebagai berikut:

Perspektif *Pemangku Kepentingan*

1. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II.
2. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas.
3. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti.
4. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian diukur dengan indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas.
5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diukur dengan indikator kinerja nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas.

Perspektif Proses Bisnis Internal

1. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dengan indicator kinerja tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan.
2. Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif dengan indicator kinerja Penerapan audit berbasis komputer (TABK).

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan diukur dengan persentase pengawasan yang sesuai dengan PKPT, persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman prosedur/standar pengawasan dan laporan keuangan Satker yang berkualitas.

Perspektif Kelembagaan

1. Terwujudnya system manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien diukur dengan indikator kinerja tingkat kesesuaian pengawasan dengan PKPT.

Tabel 1. Rencana Kinerja TA 2020

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	
Perspektif Pemangku Kepentingan					
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	2,8	Persen
		2	Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *IKU	5	Persen
		3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80	Persen
		4	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti olehsatker cakupan tugas Inspektorat UU	91	Persen
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	5	Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	3,6	Nilai
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75	Persen
		2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76	Persen
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70	Persen

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Inspektorat II pada tahun 2020 mempunyai Kegiatan "Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II" dengan anggaran awal sebesar Rp.3.438.717.000,- dan setelah pemotongan/penghematan menjadi sebesar Rp.958.392.000,- yang terdiri dari Laporan Hasil Audit Inspektorat II, Laporan Hasil Reviu Inspektorat II, Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Inspektorat II, Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II dan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pengawasan Inspektorat II. Alokasi anggaran kegiatan tersebut terdiri dari :

Tabel 2. Alokasi Anggaran Inspektorat II Tahun 2020

kode	Uraian	vol	Pagu Revisi
1842	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II		958.392.000
1842.001	Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	7 Laporan	176.218.000
051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran		7.519.000
052	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas		8.519.000
053	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya		160.180.000
1842.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	7 Laporan	71.745.000
051	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		71.745.000
A	Koordinasi Reviu Laporan Keuangan dan BMN		34.611.000
B	Reviu Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II		37.134.000
1842.003	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II [Base Line]	2 Laporan	258.115.000
051	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II		4.346.000
052	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan		253.769.000
AA	Persiapan pelaksanaan Monev Program Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB)		11.346.000
AB	Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring ke Dinas Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi		242.423.000
1842.004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	1 Laporan	209.439.000
052	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi		209.439.000

A	Koordinasi Pemetaan BMN yang Belum Dihilangkan di Ditjen ILMATE dan IKMA		63.546.000
C	Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Ditjen ILMATE dan IKMA		139.674.000
D	Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Ditjen ILMATE dan IKMA		6.219.000
1842.965	Layanan Audit Internal	1 Layanan	383.458.000
052	Pelaksanaan audit internal		242.875.000
A	Audit Kinerja pada Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika		82.002.000
B	Audit Program Pengembangan dan Penumbuhan Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan BPIPI Sidoarjo		96.211.000
C	Audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) Ditjen ILMATE dan IKMA		54.970.000
054	Tindak Lanjut Hasil Laporan Pemeriksaan LHP		5.346.000
055	Reviu Perencanaan Anggaran		6.346.000

D. DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Penetapan Kinerja merupakan tekad atau janji rencana kerja tahunan yang akan dicapai antara Inspektur II yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Inspektur Jenderal.

Penetapan kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Namun seiring dengan berjalannya program kegiatan, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2020, sasaran Inspektorat II pada tahun 2020 berubah menjadi seperti tabel 1.

Jika sasaran tersebut dikaitkan dengan kegiatan yang tertuang dalam DIPA, maka sasaran kinerja tersebut dapat dicapai melalui:

1. Meningkatnya efektivitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang – undangan (assurance) melalui Layanan Audit Inspektorat II dan Layanan Reviu Inspektorat II.

2. Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan program dan pengendalian internal (*consulting*) melalui Layanan Monitoring dan Evaluasi Cakupan Tugas Inspektorat II.
3. Terselenggaranya Layanan Pengawasan yang efektif dan efisien melalui layanan Reviu RKA-KL satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II.
4. Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal yang efektif melalui layanan Penyusunan Dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada tahun 2020 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kinerja TA 2020

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	
Perspektif Pemangku Kepentingan					
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1	Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	2,8	Persen
		2	Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *IKU	5	Persen
		3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80	Persen
		4	Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti olehsatker cakupan tugas Inspektorat UU	91	Persen
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	5	Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	3,6	Nilai
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75	Persen
		2	Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76	Persen
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70	Persen

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat II Tahun 2020 di perspektif pemangku kepentingan dan perspektif proses bisnis internal yaitu :

1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II;
2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II; dan
3. Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II.

Untuk melaksanakan rencana kinerja tersebut Inspektorat II pada tahun 2020 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Layanan Audit Inspektorat II:
 - a) Audit Kinerja Unit Pusat dan Vertikal;
 - b) Audit Dana Dekonsentrasi Perindustrian;
 - c) Audit Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
 - d) Audit Khusus;
 - e) Pembinaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan.
2. Layanan Reviu Inspektorat II :
 - a) Reviu Laporan Keuangan/BMN Inspektorat II pada Semester I dan II;
 - b) Reviu PIPK (Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan);
 - c) Reviu Perencanaan Anggaran (RKA-KL) pada Unit Pusat, Vertikal dan Dekonsentrasi;
3. Layanan Moitoring Dan Evaluasi Inspektorat II:
 - a) Monitoring dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b) Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan tata Kelola Kepemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan (Monev WUB Dana Dekonsentrasi) ;
4. Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II:
 - a) Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE;
 - b) Pengawasan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal IKMA dan Direktorat Jenderal ILMATE;

5. Layanan Manajemen Pengawasan Inspektorat II;
 - a) Penyusunan Program Kerja dan Anggaran;
 - b) Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II;
 - c) Peningkatan Peran Pengawasan lain.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Inspektur II kepada Inspektur Jenderal, khususnya mengenai pengawasan atas penyelenggaraan tugas pokok Kementerian Perindustrian pada tahun 2020. Untuk mendapatkan penilaian atas pelaksanaan tugas Inspektorat II dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Jenderal. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 yaitu :

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
Perspektif Pemangku Kepentingan					
		1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	2,8%	0,035%	Tercapai target
		2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *IKU	5%	0%	Tercapai target
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%	Tercapai target
		4. Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	80%	48,15%	Tidak tercapai target

2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	5. Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	3,6	Ditjen IKMA 3,8 dan Ditjen ILMATE 3,640	Tercapai target
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					
		1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	97,2%	Tercapai target
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%	Tercapai target
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	78,26%	Tercapai target
		Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%	Tercapai target

Dari indikator kinerja yang telah dilakukan penjelasan akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang-undangan (assurance)

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	2,8%	0,035%
		2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang	5%	0%

		tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *IKU		
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%
		4. Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti olehsatker cakupan tugas Inspektorat UU	91%	48,15%

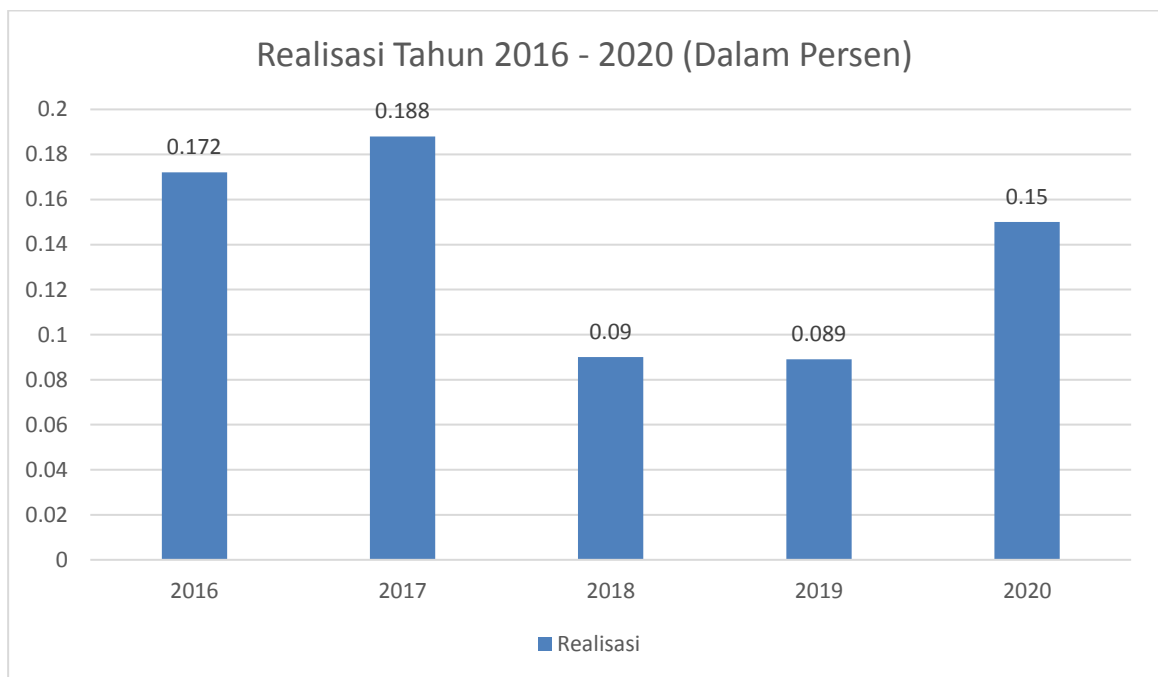
1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II target 2,8%, Realisasi capaian kinerja pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II pada Direktorat Jenderal ILMATE dan Ditrektorat Jenderal IKMA senilai 0,035% dengan nilai realisasi anggaran Rp. 263.507.082.931 dan nilai temuan pemeriksaan BPK pada cakupan tugas Inspektorat II sebesar Rp. 92.352.636,- sehingga capaian realisasi kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%.

Realisasi capaian kinerjanya pada triwulan IV untuk kementerian Perindustrian senilai 0,15% dengan Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian sebesar Rp3.368.036.653.338,- dan Nilai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp4.967.582.710,- sehingga capaian realisasi kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%.

Bahwa perhitungan ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra versi awal.

Realisasi tahun 2016 - 2020 sebagai berikut :

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2016	R 2016	T 2017	R 2017	T 2018	R 2018	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020
1	Meningkatnya efektifitas, efesiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	3. Presentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0,172 %	<3 %	0,188 %	<3 %	0,09 4%	<3 %	0,08 9%	<2,8%	0,035 %



Grafik 1. Realisasi Tahun 2016-2020

- Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II target 5%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai yaitu hasil audit pada Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) yang berjumlah 10 temuan dan 11 Rekomendasi dan Hasil Audit pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang berjumlah 17 temuan dan 18 rekomendasi jumlah temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti (cacat temuan) sampai dengan

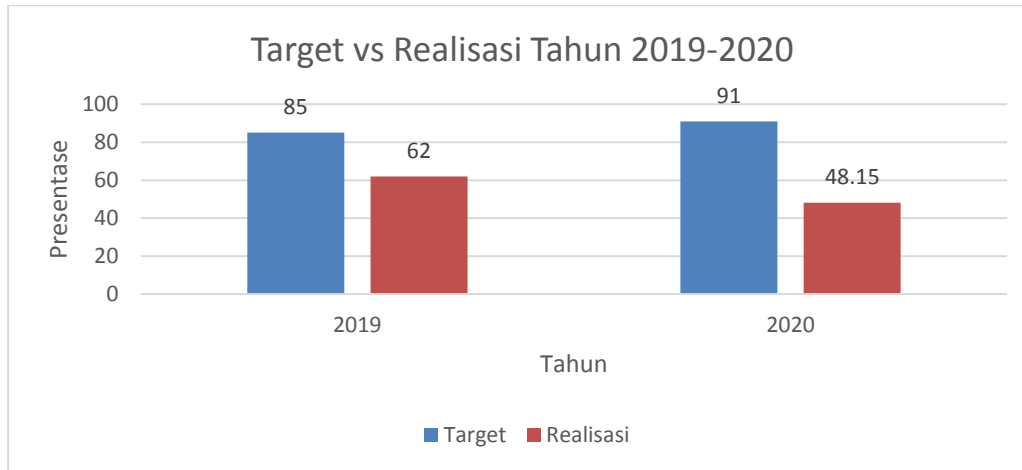
Triwulan IV adalah 0% (Nol Persen) Sehingga capaian realisasi kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%.

Bahwa perhitungan ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra versi awal.

3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti dengan target 80%, pada Triwulan IV tidak terdapat konsultasi dan/atau pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan masuk ke Inspektorat II realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%.
4. Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 91%, terjadi pelambatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan oleh satker dan kegiatan FGD Tindak Lanjut Pengawasan direvisi untuk penghematan (setelah penyesuaian anggaran dikarenakan Covid 19), realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai yaitu hasil audit pada Ditjen IKMA yang berjumlah 10 temuan dengan jumlah rekomendasi perbaikan sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti, tetapi belum sesuai rekomendasi dan Hasil Audit pada Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika yang berjumlah 17 temuan dan 18 Rekomendasi telah ditindaklanjuti 2 tetapi belum sesuai rekomendasi. Sehingga realisasi capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 48,15% (13 dari 27 Temuan).

Realisasi tahun 2019-2020 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (assurance)	4.Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	85%	62%	91%	48,15%



Grafik 2. Target vs Realisasi Tahun 2019-2020

2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II	3,6	- Ditjen IKMA 3,8 - Ditjen ILMATE 3,640

Sasaran Program Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan indikator kinerja Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II dengan target 3,6, Nilai Maturitas SPIP Direktorat Jenderal IKMA 3,8 dan Direktorat Jenderal ILMATE adalah 3,640% (Target Nilai Maturitas 3,6). Sehingga realisasi capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%.

3. Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	97,2%
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan target 75%, realisasi capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 97,2% stakeholder menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan standar pengawasan. Sehingga realisasi capaian kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100%. Realisasi tahun 2018-2020 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2018	R 2018	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020
1	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	85%	100%	85%	100%	75%	100%



Grafik 3. Target vs Realisasi Tahun 2018-2020

2. Persentase Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK) dengan target 76%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan

kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dilakukan dengan menggunakan bantuan lima aplikasi berbasis komputer yaitu aplikasi SIMAK-BMN, SAIBA, SAS, Buku Kas Bendahara, dan RKA-K/L. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah selesai dan memenuhi kriteria tersebut pada triwulan IV adalah audit BMDTP (1 dari 3 kegiatan audit) realisasi adalah 33,33%. Sehingga capaian realisasi kinerjanya sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 100% (Dari 3 kegiatan audit yang sudah dilaksanakan Inspektorat II yaitu Audit pada Ditjen IKMA, Audit pada Ditjen ILMATE dan Audit BMDTP pada Ditjen ILMATE dan Ditjen IKMA).

4. Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien

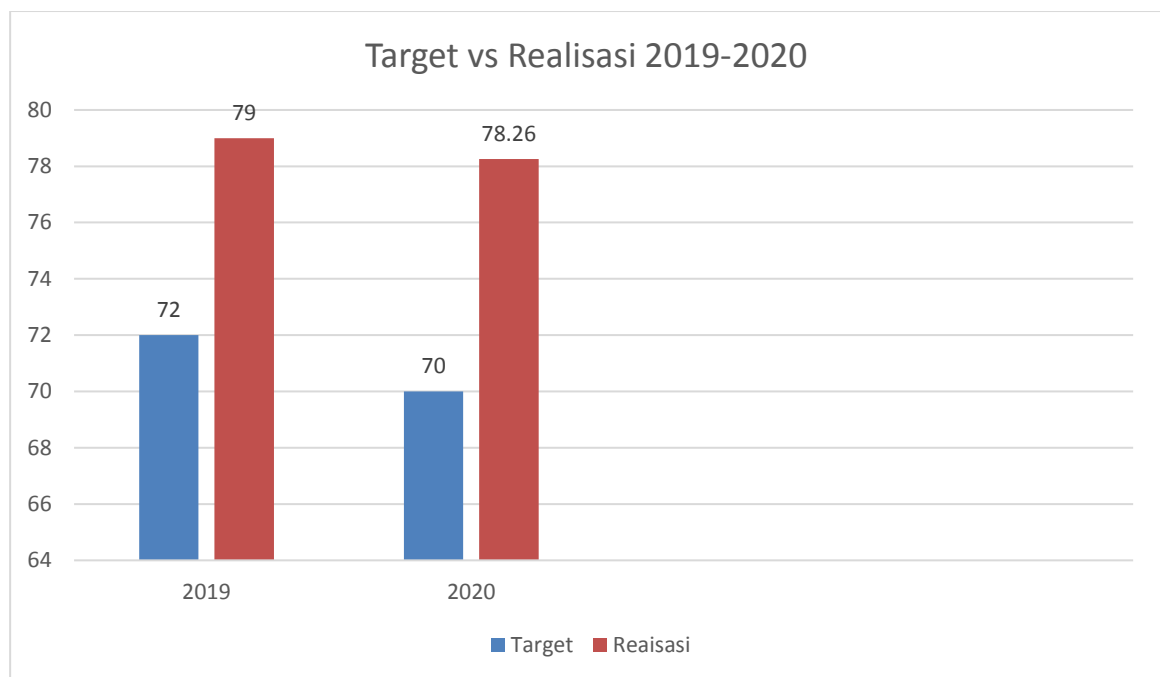
No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	78,26%
		2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%

1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT adalah 70%, realisasi capaian kinerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kegiatan pengawasan internal yang sudah selesai dengan PKPT yang telah disusun. Pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang sesuai dengan PKPT (kesesuaian Surat Tugas dengan +/- 14 hari dari jadwal yang tertera di PKPT), PKPT Inspektorat II pada Triwulan IV terjadi perubahan pola kerja dari work from office (WFO) ke work from home (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilakukan Revisi I dan II dampak dari pandemic Virus Corona. Kegiatan pada Triwulan IV (Oktober sampai dengan Desember) adalah Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) pada

Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKMA, dan Audit BMDTP pada Direktorat Jenderal ILMATE, Capaian Realisasi Kinerja triwulan IV (Oktober-Desember) adalah 8,7 % (2 dari 23 kegiatan pengawasan Inspektorat II) sedangkan capaian realisasi sampai dengan Triwulan IV (Januari-Desember) adalah 78,26% (18 dari 23 Jenis kegiatan Inspektorat II dalam PKPT).

Realisasi tahun 2019-2020 sebagai berikut:

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	T 2019	R 2019	T 2020	R 2020
2.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	72%	79%	70%	78,26%



Grafik 4. Target vs Realisasi Tahun 2019-2020

2. Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya dengan target 80%, realisasi capaian kerjanya pada Triwulan IV dapat diukur berdasarkan kesesuaian penugasan dan surat tugas dengan peran pengawasan auditor sesuai sertifikasi JFA terakhir yang dimiliki. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Inspektorat II yaitu : Reviu LK/BMN BPIPI Semester I, Reviu

LK/BMN IKMA Semester I, Penyelesaian HIBAH BMN, Reviu LK/BMN ILMATE Semester I, Reviu Pagu anggaran Ditjen IKMA TA 2021, Evaluasi Program WUB Dana Dekonsentrasi, Cek Fisik atas BMN Ditjen ILMATE, Pengawasan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) pada Direktorat Jenderal ILMATE dan Direktorat Jenderal IKMA, dan Audit BMDTP pada Direktorat Jenderal ILMATE Sehingga capaian realisasi kinerjanya pada Triwulan IV (Januari - Desember) adalah 100% (Pemeranan penugasan auditor sesuai dengan sertifikasi dan jabatannya maupun tugas limbah ke atas ataupun kebawah 1 tingkat dari jabatan, maka dianggap sesuai).

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan Tahun 2019.

Capaian Kinerja Tahun 2015

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
1	Meningkatnya ketaatan terhadap perundang - undangan	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	<3%
		Nilai SAKIP Kementerian	Predikat B	Nilai Sakip 74,03 Predikat B
		Persentase nilai SAKIP satuan kerja Eselon I minimal B	85 persen	Itjen B, KII B, BIM B, Persen : 100%
3	Meningkatnya Integritas Pelayanan Publik	Persentase kepatuhan unit melaksanakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan minimum	75 persen	73,02%
4	Meningkatnya efektivitas penerapan sistem pengendalian internal	Jumlah Satuan Kerja yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Hingga Level 3	5 satker	BIM, KII, Itjen, BBLM, ATI padang, BDI Medan (6 satker)
5	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan kebijakan industry	Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri yang ditindak lanjuti	1 rekomendasi kebijakan	1 Rekomendasi

Perspektif Proses Internal				
		Persentase pelaksanaan pengawasan yang sesuai PKPT	90 persen	91%
		Persentase pengawasan yang sesuai dengan pedoman dan prosedur/standar pengawasan	80 persen	95%
		Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian	WTP	WTP
Perspektif Pembelajaran Organisasi				
		Persentase pegawai yang mendapatkan diklat dari seluruh pegawai Inspektorat Jenderal	90 persen	40%
		Jumlah auditor yang menulis artikel/karya tulis yang dipublikasikan	4 orang	4 Orang
		Persentase kepuasan pelanggan terhadap layanan pengawasan	90 persen	88,5%
		Nilai akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal	Nilai SAKIP B	Nilai : 70,59 Predikat B
		Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008	1 sertifikat	1 sertifikat
3	Perencanaan dan penganggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	85 persen	100%
		Persentase penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal	90 persen	99,02%

Capaian Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
		Prosentase Laporan Keuangan Satuan Kerja sesuai dengan SAP dan peraturan perundang – undangan	90 %	100%

		Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,172%
		Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	78 %	80,92 %
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industry dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

Capaian Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan ketaatan terhadap perundang - undangan	Prosentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3 %	0,188%
		Persentase nilai rata – rata SAKIP unit Eselon I minimal B	100 %	100% BPPI 87,41 atau AA IKTA 86,17 atau AA
		Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi
		Jumlah pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal terhadap unit pusat, unit vertikal dan dana dekonsentrasi Perindustrian	23 satuan kerja	23 satuan kerja

Capaian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi
Perspektif Pemangku Kepentingan				
		1. Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan	92%	100%
		2. Persentase temuan BPK di bawah <i>materiality threshold</i>	<3%	0,094%
		1. Tingkat kematangan SPIP Satker mencapai tingkat 3	100%	100%
		2. Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	100%	100% BPPI 86,95 (AA) IKTA 85,50 (AA)
		3. Persentase konsultasi dan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang tertangani	90%	100%
Perspektif Proses Bisnis Internal				
		1. Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti	70%	100%
		2. Penerapan Standar Operasi Prosedur (SOP) Manajemen Pengawasan yang tersertifikasi ISO	2 SOP	2 SOP
		1. Persentase tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	80%	90,20%
		2. Nilai rata-rata pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan	85%	100%

Capaian Kinerja Tahun 2019

NO.	SASARAN PROGRAM	KODE	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
		S1	Persentase laporan keuangan satuan kerja yang sesuai SAP dan peraturan perundang-undangan *) IKU	95%	50%	
		S2	Penyelesaian tindak lanjut saran/rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh satuan kerja cakupan tugas *) IKU	85%	63,64%	
		S3	Persentase temuan BPK di bawah materiality threshold	<3%	0,089253 %	
		S4	Rekomendasi perbaikan kebijakan industri dan/atau tata kelola pemerintahan yang ditindaklanjuti *) IKU	60%	100%	
		S5	Persentase Nilai SAKIP Unit Eselon I yang mendapatkan nilai AA	75%	(0%)Tidak tercapai	
		S6	Persentase jumlah rekomendasi hasil reviu perencanaan dan anggaran yang ditindaklanjuti *) IKU	80%	100	
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL						
		T1	Persentase tingkat kesesuaian terhadap pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	72%	79%	
		T2	Persentase pelaksanaan penugasan dan pelaporan pengawasan yang memenuhi standar mutu pengawasan *) IKU	85 %	100%	

PESFEKTIP KELEMBAGAAN						
3	Tersedianya bahan informasi pengawasan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang mudah diakses	L1	Persentase pelaksanaan pengawasan yang berbasis IT	50 %	100%	
4	Terwujudnya birokrasi yang efektif dalam lingkup pengawasan internal	L2	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	Nilai AA	Tidak tercapai target	

Capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2020

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja (IK)	Target	Realisasi	Ket
Perspektif Pemangku Kepentingan					
1		1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	2,8%	0,035%	Tercapai target
		2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *IKU	5%	0%	Tercapai target
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%	Tercapai target
		4. Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	80%	48,15%	Tidak tercapai target
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	5. Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	3,6	Ditjen IKMA 3,8 dan Ditjen ILMATE 3,640	Tercapai target
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL					

3	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	97,2%	Tercapai target
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%	Tercapai target
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN					
4.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%	78,26%	Tercapai target
		Tingkat Kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%	Tercapai target

**REALISASI SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
INSPEKTORAT II TAHUN 2020-2024**

			Target					Realisasi					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Peningkatan Pengawasan Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II													
Stakeholders Perspective													
SK1	Terwujudnya Keefektifan dan Keefisienan Program Kerja Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat I												
	1	Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	1.5%	1.4%	1.3%	1.2%	1%	0.035%				
	2	Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Cakupan Tugas Inspektorat II	Persen	10%	8%	6%	4%	2%	0%				
	3	Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	80%	85%	90%	95%	100%	100%				

	4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan pada cakupan tugas Inspektorat II	Persen	91%	91.5%	92%	92.5%	93%	48.15%				
SK2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Unit Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II Yang Baik												
	1	Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Cakupan Tugas Inspektorat II	Level	3	3	3	4	4	Ditjen IKMA 3,8 dan Ditjen ILMATE 3,640				
Internal Process Perspective													
SK3	Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan Internal Yang Efektif												
	1	Tingkat kesesuaian Pelaksanaan pengawasan di Inspektorat II dengan standar pelaksanaan pengawasan	Persen	75%	75%	80%	80%	85%	97.20%				

Learn And Growth Perspective													
SK4	Terwujudnya Sistem Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien												
	1	Tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan PKPT pengawasan	Persen	70%	80%	90%	100%	100%	78.26%				

Capaian Kinerja Inspektorat II yang dibandingkan dengan target nasional yang tertuang dalam Buku II RPJMN 2015 – 2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.

AN 20 x Buku III RPJMN x PERPRES NOMO x LAMPIRAN PER x Perpres No. 79 x Pemerin
5-2019.pdf

TABEL 7.1
Indikator Kinerja Rpjmn 2015-2019 Bidang Aparatur Negara

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019	Sumber
A Sasaran 1: Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel					
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan				
a.	Kementerian/Lembaga	%	74	95	BPK
b.	Provinsi	%	52	85	BPK
c.	Kabupaten	%	18	60	BPK
d.	Kota	%	33	65	BPK
2.	Tingkat Kapabilitas ASN	Skor 1-5	1	3	BPKP
3.	Tingkat Implementasi SPIE Kematangan	Skor 1-5	1	3	BPKP
4.	Instansi Pemerintah yg Akuntabel (Skor B atas LAKIP)				
a.	Kementerian/Lembaga	%	39,3	85	Kemenpan dan RB
b.	Provinsi	%	27,3	75	Kemenpan dan RB
c.	Kabupaten/Kota	%	0,8	50	Kemenpan dan RB
5.	Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	30 (2013)	80	LKPP
B Sasaran 2: Pemerintahan yang Efektif dan Efisien					
1.	Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional	Skor 1-100	33,48	83,48	Kemenpan dan RB
a.	Kementerian/Lembaga	Skor 1-100	50	100	Kemenpan dan RB
b.	Provinsi	Skor 1-100	38,33	88,33	Kemenpan dan RB
c.	Kabupaten/Kota	Skor 1-100	28,33	78,33	Kemenpan dan RB
2.	Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1-100	76	86	BKN

7-28 | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019

u 1.pdf ^ Perpres Nomor 79pdf ^ Perpres Nomor 79pdf ^ LAP SPD capacity.doc

Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Opini WTP atas laporan keuangan (K/L; prov; kab; kota) (%)	74,00	78,00	82,00	87,00	91,00	95,00
	52,00	57,00	64,00	73,00	78,00	85,00
	30,00	36,00	42,00	48,00	54,00	60,00
	41,00	46,00	51,00	56,00	61,00	65,00
Persentase K/L; prov; kab/kota) yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) (%)	47,00	53,00	59,00	61,00	69,00	75,00
	N/A	20,00	30,00	40,00	50,00	60,00
	N/A	5,00	15,00	25,00	35,00	45,00
Persentase instansi Pemerintah (K/L; provinsi; kab/kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori "B" keatas) (%)	60,24	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
	30,30	39,00	48,00	57,00	66,00	75,00
	2,38	11,50	21,00	30,50	40,00	50,00
Tingkat e-procurement (%)	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00
Tingkat kapabilitas APIP level 3 (K/L; prov; kab/kota) (%)	N/A	4,17	20,00	40,00	56,00	85,00
	N/A	5,00	20,00	40,00	74,00	85,00
	N/A	5,00	10,00	30,00	51,00	70,00
Tingkat Kepatuhan K/L; prov; kab/kota dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau) (%)	64,00	70,00	80,00	58,00	78,00	100,00
	15,00	25,00	35,00	55,00	77,50	100,00
	50,00	60,00	70,00	54,50	77,25	100,00
	5,00	10,00	20,00	30,50	45,25	60,00
Tingkat Maturitas SPIP Level 3 (K/L; prov; kab/kota) (%)	N/A	4,17	25,00	45,00	55,00	85,00
	N/A	10,00	25,00	45,00	74,00	85,00
	N/A	5,00	10,00	30,00	51,00	70,00

Keterangan : *) tidak ada target capaian pertahun sesuai dengan RPJMN 2015-2019

**) data capaian tidak tersedia karena tidak dilakukan survei

Dimana capaian kinerja Inspektorat II Tahun 2019 sesuai dengan target yang tertuang di RPJMN 2015 – 2019 adalah :

- Target dalam RPJMN untuk sasaran Persentase instansi Pemerintah (K/L; provinsi; kab/kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori "B" keatas) (%) dengan capaian nilai SAKIP untuk unit binaan Inspektorat II Tahun 2020 yaitu, Direktorat Jenderal ILMATE mendapat nilai 81,27 (A) dan Direktorat Jenderal IKMA mendapat nilai 82,16 (A);

1. Target dalam RPJMN untuk sasaran Tingkat kematangan Implementasi SPIP dengan target level 3 dengan capaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “**terdefinisi**” atau tingkat 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan, nilai maturitas SPIP sebesar **3,827**.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi anggaran TA 2020 sebesar Rp. 933.873.302,- atau 97,44% dari Pagu Anggaran Inspektorat II Rp. 958.392.000,- (Anggaran setelah pemotongan) berdasarkan data *Aplikasi SAS*. Pada saat penyusunan laporan terdapat perbedaan realisasi keuangan antara data dari *laporan triwulan dengan Aplikasi SAS* karena terdapat realisasi yang belum diinput dalam aplikasi laporan triwulanan pada saat pembuatan laporan PP 39. Realisasi anggaran TA 2019 sebesar Rp, 3.201.341.105,- atau 94,44% dari Pagu Anggaran Rp. 3.389.800.000,- (Anggaran setelah Revisi) berdasarkan data *online monitoring SPAN*. Jika dilihat dari hal tersebut, maka capaian realisasi keuangan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3%.

Tabel 3. Capaian Realisasi Keuangan Inspektorat II Tahun 2020

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	PAGU REVISI	REALISASI		SISA	REAL. FISIK
1842	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.438.717.000	958.392.000	933.873.302	97,44	24.518.698	100
1842.001	Manajemen Kinerja Pengawas dan pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	590.249.000	176.218.000	174.749.068	99,17	1.468.932	100

051	Penyusunan Program Kerja dan Anggaran	26.692.000	7.519.000	7.299.000	97,08	220.000	100
052	Penyusunan Dokumen Evaluasi dan akuntabilitas	28.865.000	8.519.000	8.341.000	97,91	178.000	100
053	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	534.692.000	160.180.000	159.109.068	99,33	1.070.932	100
1842.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	133.232.000	71.745.000	70.125.100	97,74	1.619.900	100
051	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Cakupan Tugas Inspektorat II	133.232.000	71.745.000	70.125.100	97,74	1.619.900	100
1842.003	Monitoring dan evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	1.316.005.000	258.115.000	250.567.200	97,07	7.547.800	100
051	Monitoring dan Evaluasi SAKIP Satuan Kerja Cakupan Inspektorat II	26.096.000	4.346.000	3.380.000	77,77	966.000	100
052	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri dan Tata Kelola Pemerintahan Sesuai Kebijakan Pengawasan	1.289.909.000	253.769.000	247.187.200	97,41	6.581.800	100
1842.004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	704.718.000	209.439.000	250.567.200	97,07	7.574.800	100
052	Konsultasi Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berisiko Tinggi	328.124.000	209.439.000	205.213.134	97,98	4.225.866	100
1842.965	Layanan Audit Internal	694.513.000	242.875.000	233.218.800	96,02	9.656.200	100
052	Pelaksanaan audit internal	363.439.000	231.183.000	223.687.400	96,75	7.495.600	100
053	Pelaksanaan audit khusus	66.431.000	-	-	-	-	-

054	Tindak Lanjut Hasil Laporan Pemeriksaan LHP	217.797.000	5.346.000	4.102.400	76,73	1.243.600	100
055	Reviu perencanaan anggaran	46.846.000	6.346.000	5.429.000	85,55	917.000	100

Perbandingan Realisasi Keuangan PP 39 dengan Aplikasi SAS TA 2020

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	Pagu Revisi	Realisasi Aplikasi SAS		Realisasi PP 39	
1842	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II	3.438.717.000	958.392.000	933.873.302	97,44	822.869.744	85.86
1842.001	Manajemen Kinerja Pengawasam dan pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	590.249.000	176.218.000	174.749.068	99,17	146.560.511	83.17
1842.002	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	133.232.000	71.745.000	70.125.100	97,74	70.123.563	97.74
1842.003	Monitoring dan evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	1.316.005.000	258.115.000	250.567.200	97.07	234.342.609	90.79
1842.004	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	704.718.000	209.439.000	250.567.200	97.07	191.071.200	91.23
1842.965	Layanan Audit Internal	694.513.000	383.458.000	233.218.800	96,02	180.771.863	74.43
	TOTAL	3.438.717.000	958.392.000	933.873.302	97,44	822.869.744	85.86

Alokasi Dan Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kinerja Dengan Indikator Yang Telah Ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kegiatan	Anggaran (Pagu Revisi)	Realisasi	%
Perspektif Pemangku Kepentingan								
		1. Batas Toleransi Temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *IKU	2,8%	0,15%	-Audit Kinerja pada Ditjen IKMA dan ILMATE -Audit BMDTP -Monev WUB -Pengawasan Triwulanan -Reviu LK/BMN, RKA KL, PIPK -Monev SAKIP -Monev Hibah BMN	776.828.000	755.021.834	97.19
		2. Jumlah Maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *IKU	5%	100%	-	-	-	-
		3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%	100%	-Peningkatan Peran Pengawasan lain	160.180.000	159.109.068	99.33
		4. Rekomendasi Hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti olehsatker cakupan tugas Inspektorat UU	91%	100%	-Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Ditjen IKMA dan ILMATE	5.346.000	4.102.400	76.74

2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik	5. Nilai Maturitas SPIP Satker cakupan tugas Inspektorat II *IKU	72%	100%	-	-	-	-
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL								
3.	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan pengawasan internal yang efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%	97,2%	-	-	-	-
		2. Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%	100%	-	-	-	-
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN								
4	Terwujudnya system manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	50 %	100%	-Penyusunan program kerja dan anggaran -Penyusunan dokumen evaluasi dan akuntabilitas	16.038.000	15.640.000	97.51
		2. Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%	100%	-	-	-	-

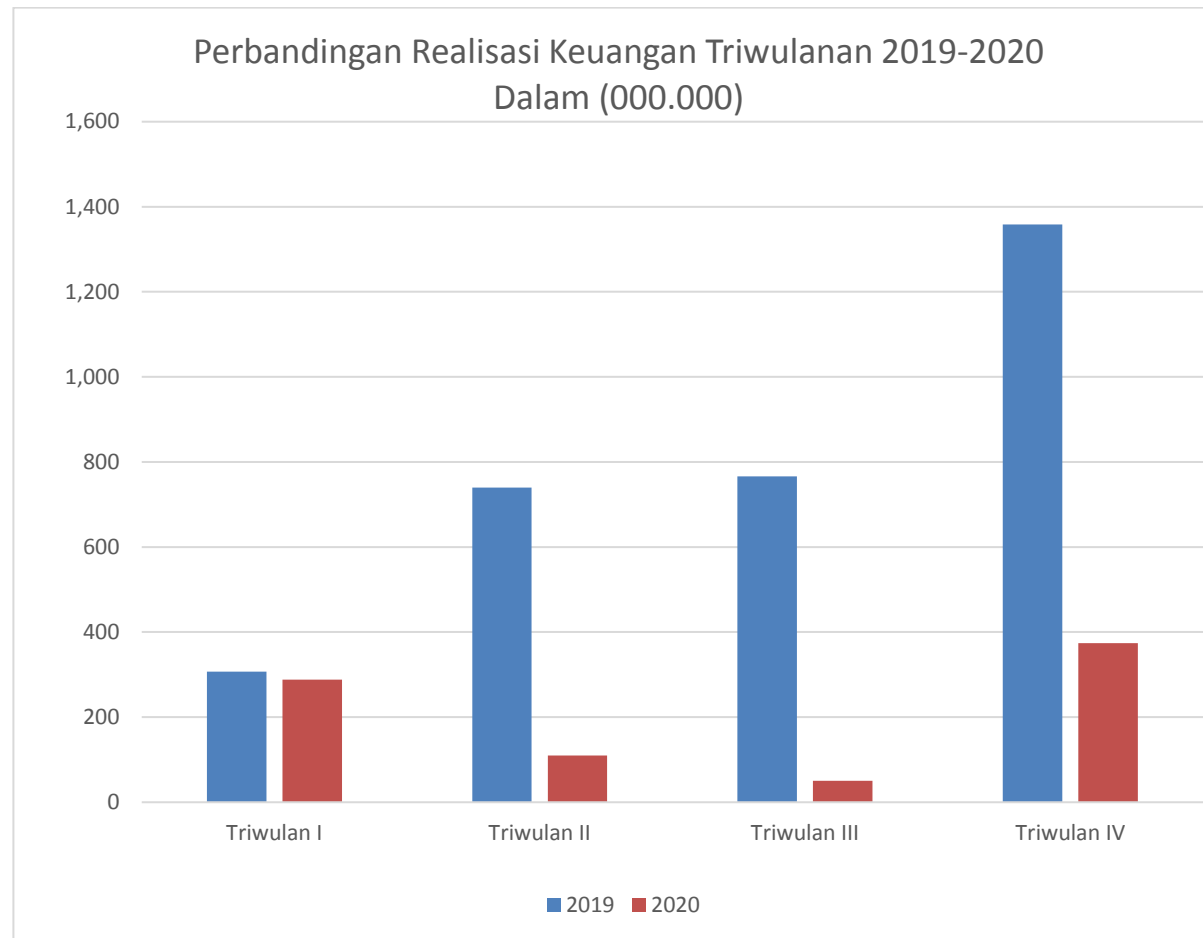
Pencapaian realisasi keuangan setiap triwulan selama tahun 2019 - 2020 adalah sebagai berikut:

Realisasi Keuangan per Triwulan 2020 berdasarkan Data Aplikasi PP39

No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	176.218.000	67.111.311	22.943.512	10.067.917	46.437.771	146.560.511	83.17
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	71.745.000	67.721.826	-	-	2.401.737	70.123.563	97.74
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	258.115.000	-	981.661	2.398.338	230.962.610	234.342.609	90.79
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	209.439.000	58.562.066	14.686.182	34.838.401	82.984.551	191.071.200	91.23
5	Layanan Audit Internal	242.875.000	94.662.122	71.657.690	3.464.029	10.988.022	180.771.863	74.43
	TOTAL	958.392.000	288.057.325	110.269.045	50.768.685	373.774.691	822.869.746	85.86

Realisasi Keuangan per Triwulan 2019 berdasarkan Data Aplikasi PP39

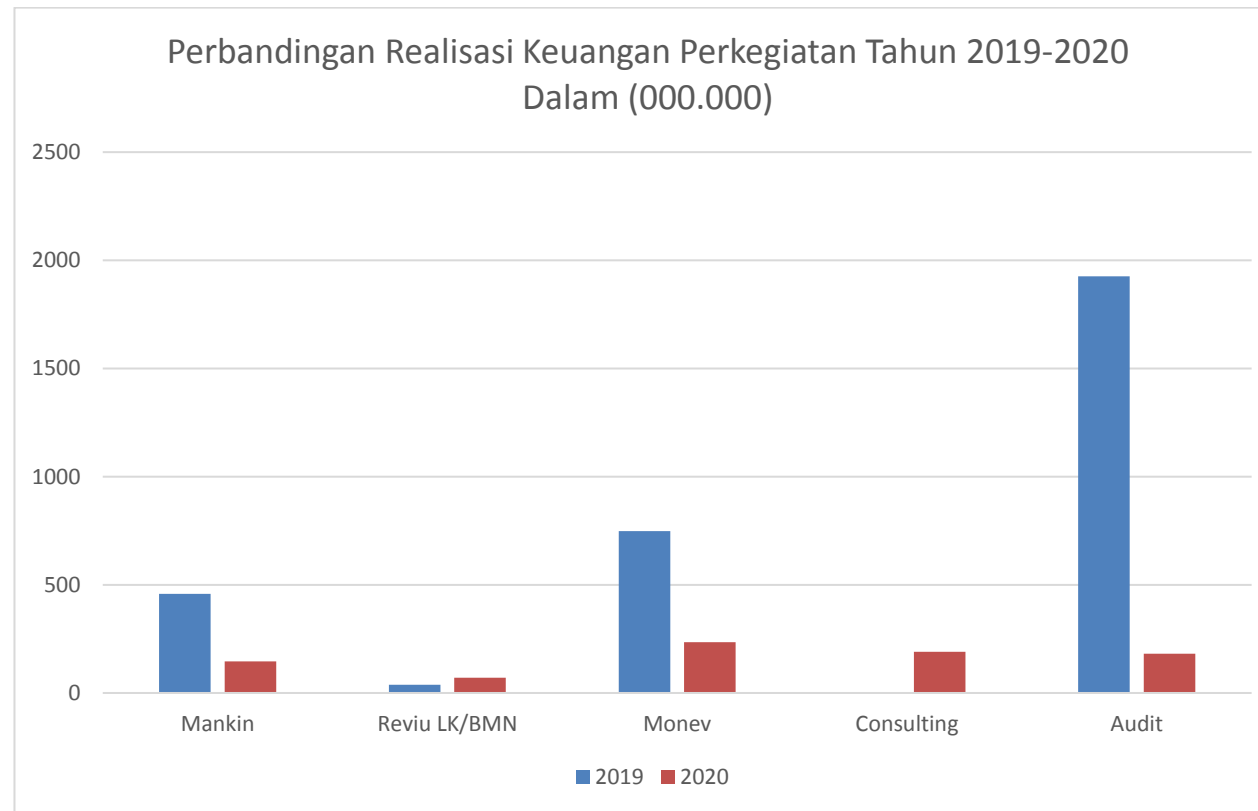
No	Program/Kegiatan	Pagu	Realisasi					% Realisasi
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	475,388,000	93,433,155	134,286,816	105,141,773	124,681,157	458,320,900	96.42
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	67,839,000	14,970,805	4,646,972	18,845,674	0	38,471,497	56.71
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	774,313,000	0	58,821,915	34,785,549	654,139,622	747,676,633	96.56
4	Layanan Audit Internal	2,072,310,000	198,827,040	542,067,958	607,497,601	579,832,338	1,926,004,914	92.94
	TOTAL	3,389,800,000	307,231,000	739,823,660	766,270,596	1,358,653,118	3,170,473,943	93.53



GRAFIK 5. REALISASI KEUANGAN TRIWULANAN TAHUN 2019-2020

Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2019 dan 2020

No	Program/Kegiatan	Pagu			Realisasi Total		
		2019	2020	Perbedaan	2019	2020	Perbedaan
1	Menejemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II	439.150.000	176.218.000	(262.932.000)	458.320.900	146.560.511	(311.760.389)
2	Reviu Laporan Keuangan dan BMN Unit Kerja Cakupan Inspektorat II	67.839.000	71.745.000	3.906.000	38.471.497	70.123.563	31.652.066
3	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II	774.313.000	258.115.000	(516.198.000)	747.676.633	234.342.609	(513.337.024)
4	Consulting Kegiatan Berisiko Tinggi Cakupan Tugas Inspektorat II	-	209.439.000	209.439.000	-	191.071.200	191.071.200
5	Layanan Audit Internal	2.072.313.000	242.875.000	(1.829.438.000)	1.926.004.914	180.771.863	(1.745.233.051)
	Total	3,389,800,000	958.392.000	(2.431.408.000)	3.170.473.944	822.869.744	(2.347.604.200)



GRAFIK 6. REALISASI KEUANGAN PERKEGIATAN TAHUN 2019-2020

Berdasarkan perhitungan *Aplikasi SAS*, pada realisasi keuangan tahun 2020 terdapat efisiensi anggaran sebagai berikut :

1. Program/ kegiatan Manajemen Kinerja Pengawasan dan Pelaporan Kinerja Pengawasan Inspektorat II.
Pada program/kegiatan ini terjadi penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2019) yaitu sekitar 59,87% (Rp. 262.932.000,-). Namun dari segi realisasi dibandingkan tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sekitar 4,73%;
2. Program/ kegiatan Hasil Reviu Inspektorat II.
Pada Program/kegiatan ini terjadi kenaikan anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2019) yaitu sekitar 5,76% (Rp. 3.906.000,-). Namun dari segi realisasi dibandingkan tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sekitar 1,32%;
3. Program/ kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Industri Cakupan Tugas Inspektorat II.
Pada program/kegiatan ini terjadi penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2019) yaitu sekitar 66,67% (Rp. 516.198.000,-). Namun dari segi realisasi dibandingkan tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sekitar 0,51%;
4. Program/ kegiatan Hasil Audit Inspektorat II.
Pada program/kegiatan ini terjadi penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya (TA 2019) yaitu sekitar 88,28% (Rp. 1.829.438.000,-). Namun dari segi realisasi dibandingkan tahun anggaran 2018 mengalami penurunan sekitar 0,26%.

Selain itu terdapat perbedaan antara realisasi pada aplikasi PP39 dengan *aplikasi SAS*. Hal ini disebabkan pada aplikasi PP39 masih terdapat beberapa SPTJB yang belum diinput oleh Bagian Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal sampai laporan ini diselesaikan. Sementara itu *aplikasi SAS* telah memperhitungkan pengembalian terhadap kas negara dan rekonsiliasi/pembetulan.

BAB IV PENUTUP

TINJAUAN UMUM KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN/KENDALA

A. KEBERHASILAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Inspektorat II tahun 2020, secara umum dapat dikemukakan :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat II tahun 2020 telah berjalan baik, tercermin dari terealisasinya Kegiatan Inspektorat II dan hasil-hasil yang dicapai.
2. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat II dalam tahun 2020 telah berjalan dengan baik sesuai dengan penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020.

B. PERMASALAHAN/KENDALA

Permasalahan/kendala yang dihadapi atas pelaksanaan kegiatan Inspektorat II tahun 2020 dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan realisasi anggaran antara aplikasi PP39 dan Aplikasi SAS yang disebabkan realisasi anggaran dalam aplikasi PP39 masih terdapat SPTJB yang belum keluar Nomor dan Tanggal SP2D-nya.
2. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat II pada Tahun Anggaran 2020 mengalami kendala yang cukup berarti dimana adanya pandemi COVID 19 yang mengakibatkan penghematan anggaran Inspektorat II sejumlah Rp.2.480.325.000,- sehingga Pagu Inspektorat II Tahun Anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 958.392.000,- selain itu juga terjadi perubahan pola kerja dari *Work From Office* (WFO) ke *Work From Home* (WFH) sehingga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) perlu direvisi, untuk realisasi kegiatan pengawasan kurang optimal mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi kegiatan perjalanan dinas keluar kota, dan adanya penyesuaian jadwal karena ada kegiatan pada Sekretariat Inspektorat Jenderal.

C. UPAYA DAN STRATEGI PEMECAHAN

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala tersebut, langkah-langkah dan strategi pemecahan yang dilakukan adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen dan melakukan penyesuaian PKPT terhadap jadwal pengawasan yang dilakukan untuk tahun anggaran 2021.
2. Melakukan perubahan/revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terlaksana sehingga fungsi pengawasan menjadi lebih optimal.
3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Itjen terhadap permasalahan realisasi keuangan di tahun 2021 agar tidak terulang kembali.
4. Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan untuk segera mengatasi hambatan penginputan SPTJB pada tahun Anggaran 2021.
5. Berkoordinasi dengan Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan untuk segera mengatasi hambatan dan kendala pelaksanaan kegiatan pada tahun Anggaran 2020.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat II Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2020 ini disusun, yang menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta hasil evaluasi dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta bahan masukan untuk pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian.

Jakarta, 26 Januari 2021

Inspektur II



Wawas Swathatafrijah

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wawas Swathatafrijiah
Jabatan: Inspektur II

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Arus Gunawan
Jabatan: Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Maret 2020

Inspektur Jenderal



Arus Gunawan

Inspektur II



Wawas Swathatafrijiah

**PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT II TAHUN 2020**

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN			
1	Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Kementerian Perindustrian	S1 Batas toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	2.8%
		S2 Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	5%
		S3 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80%
		S4 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	91%
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	S5 Nilai Maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II *) IKU	3.6
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL			
3	Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	T1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75%
		T2 Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAN			
4	Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien	L1 Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70%
		L2 Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80%

KEGIATAN

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri Inspektorat II

**ANGGARAN
Rp3,438,717,000**

Total Anggaran Tahun 2020 : **Rp3,438,717,000**
(Tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah)

Inspektur Jenderal,



Arus Gunawan

Jakarta, 10 Maret 2020
Inspektur II



Wawas Swathatafrijiah



Kegiatan Inspektorat II

[Monitoring Capaian](#)

[Sasaran & Indikator](#)

No.	Indikator	Target	TW I		TW II		TW III		TW IV		Real. Fisik	Real. Keu	Capaian
			T	R	T	R	T	R	T	R			
1.	IJ.C1 - Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian												
	IJ.C1.1 - Batas Toleransi temuan material pengawasan pada satuan kerja cakupan tugas Inspektorat II	2,8 %	21%	27%	37%	34%	63%	80%	100%	100%	100%	87%	100%
	Pagu = Rp. 776.828.000												
	IJ.C1.4 - Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektorat II	5 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	Pagu = Rp. 0												
	IJ.C1.3 - Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	80 %	25%	35%	50%	35%	75%	85%	100%	100%	100%	85%	100%
	Pagu = Rp. 160.180.000												
	IJ.C1.2 - Rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti oleh satker cakupan tugas Inspektorat II	91 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	44%	48,15%
	Pagu = Rp. 5.346.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 942.354.000												
2.	IJ.C2 - Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik												
	IJ.C2.1 - Nilai maturitas SPIP satker cakupan tugas Inspektorat II	3,6 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
3.	IJ.C3 - Terselenggaranya pengawasan internal yang efektif												
	IJ.C3.2 - Penerapan Teknik Audit Berbasis Komputer (TABK)	76 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	Pagu = Rp. 0												
	IJ.C3.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan	75 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	97,2%
	Pagu = Rp. 0												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 0												
4.	IJ.C4 - Terwujudnya sistem manajemen pengawasan internal yang efektif dan efisien												
	IJ.C4.2 - Tingkat kesesuaian penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	80 %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
	Pagu = Rp. 0												
	IJ.C4.1 - Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan PKPT	70 %	33%	35%	55%	60%	78%	82%	100%	100%	100%	98%	79,26%
	Pagu = Rp. 16.038.000												
	Total Pagu Sasaran = Rp. 16.038.000												
	Total Pagu Keseluruhan = Rp. 958.392.000												

REALISASI PENCAPAIAN PERJANJIAN KERJA INSPEKTORAT II
TAHUN ANGGARAN 2020
Unit Organisasi : Inspektorat II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun I		Tahun II		Tahun III		Tahun IV		Penanggung Jawab	Pelaksana
			Rencana Kegiatan	TARGET ANJARA	Realisasi	Rencana Kegiatan	TARGET ANJARA	Realisasi	Rencana Kegiatan	TARGET ANJARA		
1	PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN 1. Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Basah toleransi kemampuan metanol pada capaian kerja capaian tugas Inspektorat II (1) IKU	- Audit Kinerja Ditema ILMATE	25%	0%	Pengawasan dan Penumbuhan IKMA dan BPIP	25%	0%	Pelaksanaan WUB Ditema IKMA	25%	0%	Seluruh Pegawai Inspektorat II
			- Revu PIPK			Evaluasi dan Monitoring			Evaluasi dan Monitoring			
			- Revu LK dan BMN Saliter			Penyediaan Hibah			Penyediaan Hibah			
			- Persiapan Pelaksanaan dan Monitoring WUB Ditema IKMA			Penyediaan Hibah			Penyediaan Hibah			
2	Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang dapat didaklarkan sesuai cakupan tugas Inspektorat II (1) IKU	5%	Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA	5%	0%	Pelaksanaan audit Khusus	25%	0%	Pelaksanaan audit Khusus	25%	0%	Seluruh Pegawai Inspektorat II
			- Pelaksanaan audit Khusus			Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya			Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya			
			- Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			
			- Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			
3	Penguatani masyarakat terkait pengawasan yang diindaklanjuti	80%	- Pelaksanaan audit Khusus	25%	0%	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	25%	0%	Pelaksanaan audit Khusus	25%	0%	Seluruh Pegawai Inspektorat II
			- Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			
			- Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			
			- Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			
4	Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh stakeholder capaian tugas Inspektorat II (1) IKU	91%	Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA	91%	0%	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	25%	0%	Pelaksanaan audit Khusus	25%	0%	Seluruh Pegawai Inspektorat II
			- Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			
			- Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			
			- Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			
2	Nilai Mutuas SPIP saliter cakupan tugas Inspektorat II (1) IKU	36%	- Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP	36%	0%	Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya	25%	0%	Pelaksanaan audit Khusus	25%	0%	Seluruh Pegawai Inspektorat II
			- Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			
			- Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			Pelaksanaan FGD Penusunan Pola Risiko dan Kertas Kerja SPIP			
			- Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			Koordinasi Penyelidikan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di IKMA			

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL	1. Tercapainya pelaksanaan pekerjaan pengawasan internal dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3. Tercapainya pelaksanaan pekerjaan pengawasan internal dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan	1. Tercapainya pelaksanaan pekerjaan pengawasan internal dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
PERSPEKTIF KELEMBAGAAAN	1. Tercapainya pelaksanaan pekerjaan pengawasan internal dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3. Tercapainya pelaksanaan pekerjaan pengawasan internal dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan	1. Tercapainya pelaksanaan pekerjaan pengawasan internal dan pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan	75%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Jakarta, Desember 2016

INSPEKTUR II

Wawas Swahalinjah

REALISASI PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan yang dilaksanakan	Anggaran	Tingkat Total	Triwulan IV			Penanggung Jawab	Fleksibilitas	
						Rencana	%	Realisasi			
1	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementrian Perindustrian	1. Batas Toleransi temuan material pengawasan pada seluruh kerja cakupan tugas Inspektoral II	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Kinerja Dijen ILMATE - Audit Pengembangan dan Penumbuhan IKMA dan BPIP - Audit BMDTP Dijen ILMATE dan Dijen IKMA - Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring ke Dinas Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi WUB Dijen IKMA - Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Dijen ILMATE dan Dijen IKMA - Reviu PIPK - Reviu RKAKL - Monev SAKIP Salkes Cakupan Inspektoral II - Koordinasi Pemetaan BMN yang Belum Dibebaskan di Dijen ILMATE dan IKMA - Pelaksanaan Evaluasi dan Monitoring Penyelesaian Hibah BMN di Dijen ILMATE dan IKMA - Reviu LK dan BMN Salkes Inspektoral II 	776.828.000	2,8%	<ul style="list-style-type: none"> - Audit BMDTP Dijen ILMATE dan Dijen IKMA - Pengawasan Triwulanan Kegiatan Prioritas Dijen ILMATE dan Dijen IKMA 	25	<ul style="list-style-type: none"> - Audit BMDTP Dijen ILMATE dan Dijen IKMA - Pengawasan Program PEN pada Dijen ILMATE dan Dijen IKMA 	100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektoral II
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2. Jumlah maksimum rekomendasi hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti sesuai cakupan tugas Inspektoral II 3. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti 4. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh salkes cakupan tugas Inspektoral II *) IKU 1. Nilai Mutu SPJP salkes cakupan tugas Inspektoral II *) IKU	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya - Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Dijen ILMATE dan IKMA 	0	5%	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya - Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Dijen ILMATE dan IKMA 	0	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Peran Pengawasan Lainnya - Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Dijen ILMATE dan IKMA 	100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektoral II
3	PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL Terselenggaranya Pengawasan Internal Yang Efektif	1. Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar pelaksanaan pengawasan		0	75%		0		100%	Inspektur II	Seluruh Pegawai Inspektoral II